Pejabat Struktural
Eselon II dan III BPN RI dilantik

Sebagai amanat Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006, lebih dirasakan lagi sebagai kebutuhan dalam meningkatkan peran pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi terutama dalam mewujudkan pemerintah dan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta dipercaya rakyat (Good Government and Good Governance).

Oleh karena itu dimulai dengan periode transisi telah dilantik secara bertahap pada bulan Juni 2006 sebanyak 695 pejabat eselon II dan III. Kemudian tahap konsolidasi pada bulan Maret 2007 sebanyak 184 pejabat eselon II dan III. Dan pelantikan bulan Januari dan Pebruari 2008 adalah tahapan pemantapan, demikian dikatakan Bapak Kepala BPN RI dalam sambutan pelantikan yang dibacakan oleh Sestama, Bapak Managam Manurung SH.,MKn, di gedung Aula Prona Lt. VII BPN RI (06/02/08).

Lebih lanjut dikatakan dalam rencana strategis 2007 – 2009 jelas BPN RI mengemban visi menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Disamping itu Bapak Kepala BPN RI mengingatkan untuk memastikan bahwa sebelas agenda selalu menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan menterjemahkan dalam konteks tugas dan fungsi.

Dan tahun 2008 BPN RI telah mencanangkan dan melaksanakan Operasi Tuntas Sengketa untuk penyelesaian 1.400 kasus sengketa dan Operasi Sidik Sengketa untuk penyelesaian 165 kasus sengketa tanah beraspek pidana di seluruh Indonesia. Dan diharapkan semua turut menyukseskan program ini. (Pusat Hukum dan Humas)

Sestama BPN RI, Bapak Managam Manurung, SH., M.Kn membacakan sambutan Bapak Kepala BPN RI

Kabid. Humas, Setyowantini, SH., M.Kn (kanan belakang) mendapat tugas baru sebagai Kabag. TU Inspektorat Utama BPN RI

Pejabat struktural eselon II dan III BPN RI yang dilantik sedang diambil sumpahnya

DAFTAR PEJABAT ESELON II dan III BPN RI
YANG DILANTIK PADA TANGGAL 6 PEBRUARI 2008
SK NOMOR 6O.130.38/2008

ESELON II

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ERNA MUCHNIARTY MOCHTAR SH., M.Si	DIREKTUR KONFLIK PERTANAHAN
2.	Ir. MAKHSUS	INSPEKTUR WILAYAH II
3.	H. HELFIE NOEZIR, SH	KAKANWIL BPN PROV. KEP BANGKA BELITUNG
4.	GUSMIN TUARITA, SH., MH	KAKANWIL BPN PROV. NTB
5.	Drs. JANTJE TUWERA, M.Si	KAKANWIL BPN PROV. NTT

ESELON III

1.	SARJONO AGUS SANTORO, SH	KABAG. TU PIMPINAN, BIRO TU PIMPINAN DAN PROTOKOL
2.	R. SALEH, SH	KABAG. KEAMANAN, BIRO TU PIMPINAN DAN PROTOKOL
3.	LUKI AMBARWINARTI, SE	KABAG. PERSURATAN DAN KARSIPAN, BIRO UMUM
4.	Drs. MARTONO	KABAG. INVENTARISASI KEKAYAAN NEGARA, BIRO UMUM
5.	IGN DWI PRIYO SUDARSONO, SH	KABAG. PERLENGKAPAN, BIRO UMUM
6.	MANINGAR HABEAHAN, SH., MM	KABAG. ANGGARAN DAN PENERIMAAN, BIRO KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
7.	Ir. ZEN WIDYATMOKO SH., MM	KABAG. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT, BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
8.	Ir. USMAN, M.Sc	KABAG. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
9.	DJUDJUK TRI HANDAYANI, SH	KABAG. MUTASI KEPEGAWAIAN, BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
10.	SUGENG MULJOSANTOSO, SH	KABAG. UMUM KEPEGAWAIAN, BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
11.	Ir. FERDANANTO ARIBOWO	KABID. BIMBINGAN DAN PENERAPAN KOMPUTERISASI SIMTANAS, PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN
12.	Drs. Kgs. ZULKIFLI, M.Si	KASUBDIT. TEMATIK WILAYAH KHUSUS, DIREKTORAT PEMETAAN TEMATIK
13.	Ir. DJONED YULIANTO, M.Sc	KASUBDIT. BATAS BIDANG TANAH, DIREKTORAT PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DAN RUANG
14.	Drs. ALIMUDDIN KADIR, SH	KASUBDIT. PENGELOLAAN TANAH, DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH
15.	SIHYADI, SH	KASUBDIT. HAK GUNA USAHA, DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK TANAH
16.	Drs. ACHMAD NUGROHO	KASUBDIT. PENGATURAN DAN EVALUASI HAK TANAH, DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK TANAH
17.	SUMARDJITO SH., M.Kn	KASUBDIT. BATAS RUANG DAN PERAIRAN, DIREKTORAT PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DAN RUANG
18.	AGUS HIDAYAT ARIEF, SH	KASUBDIT. PENGUASAAN TANAH OBJEK LANDREFORM DAN GANTI KERUGIAN, DIREKTORAT LANDREFORM
19.	Ir. TRIAS WIRIAHADI	KASUBDIT. INVENTARISASI DAN BASIS DATA LANDREFORM, DIREKTORAT LANDREFORM
20.	Ir. SAMSULIARTI	KASUBDIT. PENYIAPAN PROGRAM DAN ZONASI, DIREKTORAT WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU
21.	WALDUS SITUMORANG SH., M.Hum	KASUBDIT. FASILITASI, DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

22.	Drs. H. SAYUTHI IS, MM	KASUBDIT. PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR, DIREKTORAT PENGELOLAAN TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN TANAH KRITIS
23.	Ir. ARIS DARYANTO	KASUBDIT. PENGENDALIAN PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN, DIREKTORAT PENGENDALIAN PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
24.	INDANG SOESILOWATI	KASUBDIT. PENGENDALIAN PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM SEKTORAL, DIREKTORAT PENGENDALIAN PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
25.	HUSAENI, SH	KASUBDIT. KONFLIK KELOMPOK MASYARAKAT, DIREKTORAT KONFLIK PERTANAHAN
26.	HENRY RUSTANDI BUTAR-BUTAR, SH	KASUBDIT. KONFLIK KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN BADAN HUKUM, DIREKTORAT KONFLIK PERTANAHAN
27.	MARDIATI PERMANA LESTARI, SH	KASUBDIT. PERKARA WILAYAH III, DIREKTORAT PERKARA PERTANAHAN
28.	SETYOWANTINI SH., M.Kn	KABAG. TATA USAHA INSPEKTORAT UTAMA
29.	BIMBIM BISMOBROTO, SH	KABID. HUBUNGAN MASYARAKAT, PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT